



Gusti Prabu Terancam Dilaporkan ke Pengadilan

Sambungan dari hal 1

Anggota Formatur Muskot PMI Kota Jogja Munif Tauchid mengatakan, Ketua PMI DIJ telah melakukan tindakan yang kontraproduktif dengan melakukan upaya penahanan SK. Alasan yang cenderung pribadi dan bukan mencerminkan rasa kemanusiaan. Padahal, susunan pengurus PMI Kota Jogja periode 2021-2026 yang menetapkan Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi sebagai ketua terpilih tersebut diklaim sudah sesuai AD/ART dan peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang ada. Pun susunan pengurus sudah berdasar hasil musyawarah antara Ketua terpilih dengan anggota formatur. Dan telah disosialisasikan ulang kepada peserta Muskot sebelum diajukan ke PMI DIJ untuk dimintakan SK pengesahan. "Tapi sejak 5 April 2021 ketua terpilih mengajukan surat kepada ketua PMI DIJ untuk menerbitkan SK pengesahan kepengurusan, sampai tiga bulan ini tidak ada respon sama sekali," katanya di kantor PMI Kota Jogja, kemarin (14/7). Dia mengancam, apabila sampai dengan 30 Juli ini SK pengesahan tidak juga dikeluarkan maka akan menggugat secara hukum ke pengadilan. Demi menjaga kemanusiaan dan penanganan pandemi di masyarakat bisa berjalan lancar. "Dengan alasan AD/ART itu kami menganggap ketika ketua PMI

DIJ tidak mengeluarkan SK berarti melanggar AD/ART yang dimaksud," tambahnya.

Belum disahkannya SK kepengurusan PMI Kota Jogja juga berdampak terhadap kinerja organisasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Koordinator Relawan PMI Kota Jogja, Trisanto mengatakan dengan adanya kemunduran pemberian SK tersebut sangat berpengaruh khususnya terhadap pelayanan PMI terutama bidang pelayanan umum. Seperti pelayanan ambulans, evakuasi pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan. Terlebih, permintaan donor plasma darah konvalesen yang meningkat drastis dua minggu lebih ini. Akibatnya semua pelayanan umum itu terhambat dan tidak bisa dilayani. "Faktanya, kami tidak punya relawan untuk melakukan evakuasi (pasien Covid-19) karena keterbatasan jumlah relawan kami," katanya. Secara pribadi sebagai perwakilan relawan PMI kota Jogja, dia tidak bisa memberikan jaminan kesehatan atau asuransi terhadap relawan ketika hendak bertugas di lapangan. Sebab, tidak ada pengurus dan ketua pengurus organisasi secara sah yang dapat melakukan persetujuan atas ketugasan tersebut. "Kalau pun kami memaksakan relawan untuk terjun kita ada jaminan apa untuk mereka. Sementara pengurus sampai sekarang belum disahkan," tandasnya.

Pun kinerjanya di lapangan

saat ini diklaim sudah menjadi sorotan. Dia mencontohkan, permintaan donor plasma konvalesen saat ini rata-rata dalam satu hari ini lebih dari 200 kantong. Sementara, pendonor yang berhasil diambil rata-rata sehari hanya sekitar 25 kantong. Pun, setiap harinya selalu ada waiting list surat permintaan dari rumah sakit yang menumpuk. "Ini juga persoalan, kadang antara kebutuhan untuk kritis A dan B harus ditentukan kebijakan pengurus. Kantong nama yang harus keluar untuk siapa-siapa harus ada yang meng-acc," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi, Gusti Prabu menyebut, masalah ini hanya di internal PMI saja. Penyelesaiannya pun, kata dia, bisa dilakukan secara musyawarah mufakat. Gusti Prabu mengaku heran dengan orang-orang yang membuka lebar persoalan ini. Ketua terpilih PMI Kota Jogja, Heroe Poerwadi pun diklaim sudah tahu persis persoalannya. "Sumonggo saja mendiskreditkan nama baik saya. Semua yang saya lakukan itu selalu rembugan beberapa pengurus dan saya tidak pernah berpikiran buruk kepada siapapun," katanya.

Dikatakan, terkait dengan pengesahan SK kepengurusan PMI kota ini bukan masalah pribadi atau berpikiran buruk kepada siapapun. Hanya, masalah kehati-hatian didalam penerbitan saja. "Semua akan dijelaskan Mas Inung (Sekretaris PMI DIJ Arief Noor Hartanto)," katanya. (wia/pru/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005